

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan alat utama yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaannya kepada para pemangku kepentingan (Mwapula, 2016). Oleh sebab itu, laporan keuangan harus memberi atau mengungkap informasi yang dapat mencerminkan kondisi aktual perusahaan pada saat ini supaya pengguna laporan keuangan tidak mengambil keputusan yang bias. Zhang et al. (2019), menjelaskan bahwa terdapat dua pengungkapan perusahaan yaitu wajib dan sukarela. Salah satu contoh dari pengungkapan wajib adalah pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas perusahaan (Zhang et al., 2019). Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat *agency theory* dan *stakeholder theory* bahwa pengungkapan informasi perusahaan dapat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan investor luar (Zhang et al., 2019).

Pernyataan di atas didukung oleh publikasi *Statement of Financial Accounting Standard* (SFAS) 157 yang mewajibkan seluruh perusahaan di Amerika Serikat untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan teknik pengukuran nilai wajar instrumen keuangan perusahaan, baik informasi kualitatif maupun kuantitatif. Namun terdapat kontroversi mengenai penggunaan metode pengukuran nilai wajar, yaitu penggunaan *fair value accounting* yang bertentangan dengan *historical cost* (Jajairam, 2012).

Jaijairam (2012), menjelaskan bahwa akuntansi nilai wajar merupakan bentuk penyempurnaan biaya historis karena penggunaan biaya historis dianggap kurang volatil jika dibandingkan dengan nilai wajar. Selain itu, penggunaan biaya historis tidak mencerminkan situasi pasar saat ini, sedangkan nilai wajar mengukur nilai aset dan liabilitas sesuai dengan kondisi pasar (Jaijairam, 2012). Chukwu & Akpeekon (2019), menyatakan bahwa akuntansi nilai wajar harus diadopsi untuk memastikan ukuran kinerja keuangan yang lebih realistis daripada biaya historis.

SFAS 157 dipublikasikan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB) pada tahun 2006 (Zhang et al., 2019). Kemudian pada 1 Mei 2011, *International Accounting Standards Board* (IASB) mempublikasikan *International Financial Report Standards* (IFRS) 13 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2013. Publikasi IFRS 13 ini membuat negara-negara lain mulai mengadopsi pengukuran nilai wajar dan menyusun standar pelaporan keuangan yang mengatur mengenai pengukuran nilai wajar. Contohnya adalah Indonesia, dimana IFRS 13 menjadi acuan dalam menyusun PSAK 68 yang mengatur mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK 68 berlaku efektif mulai 1 Januari 2015 (PSAK 68, 2013). Definisi nilai wajar dalam PSAK 68 (2013) yaitu harga yang diterima saat menjual aset atau harga yang dibayar saat mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antar pelaku pasar pada saat tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan adanya pertukaran aset atau liabilitas dalam transaksi yang teratur antar pelaku pasar pada tanggal

pengukuran yang didasarkan pada keadaan pasar saat ini (PSAK 68, 2013). Zhang et al. (2019), menjelaskan bahwa pengungkapan pengukuran nilai wajar ini memberikan transparansi yang lebih besar bagi pengguna mengenai teknik penilaian yang digunakan perusahaan untuk mengukur nilai wajar asetnya. PSAK 68 (2013), menjelaskan bahwa teknik penilaian dalam mengukur nilai wajar berguna untuk memaksimalkan *input* yang dapat diobservasi dan meminimalkan *input* yang tidak dapat diobservasi. *Input* level 1 merupakan harga kuotasian yang dapat ditemukan di pasar aktif, *input* level 2 merupakan *input* selain harga kuotasian yang masih dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan *input* level 3 merupakan *input* yang tidak dapat diobservasi (PSAK 68, 2013).

Meskipun pengungkapan metode nilai wajar merupakan hal yang wajib, namun perusahaan memiliki opsi untuk mengadopsi level dan tingkat yang digunakan untuk mengukur nilai wajar (Zhang et al., 2019). Kondisi tersebut menimbulkan perhatian khusus mengenai penggunaan *input* nilai wajar level 3. Zhang et al. (2019), menjelaskan bahwa pengukuran aset level 3 bergantung pada kebijaksanaan manajerial. Yao et al. (2016), menyatakan bahwa valuasi nilai wajar level 3 memberi manajer keleluasaan untuk memanipulasi laba karena nilainya diestimasi secara internal dan oleh sebab itu perbankan mungkin secara oportunistik memilih untuk mengklasifikasikan lebih banyak aset keuangan pada level 3 dengan tujuan untuk manajemen laba. Pernyataan di atas dibuktikan oleh hasil penelitian Chong et al. (2012) yang menyatakan bahwa bank menggunakan *input* level 3 sebagai kesempatan untuk melakukan

manajemen laba. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara penggunaan *input* level 3 dengan kinerja bank yang buruk.

Penelitian lainnya mengenai nilai wajar oleh Zhang et al. (2019) juga memberikan hasil yang cukup menarik yaitu bank dengan tata kelola perusahaan yang kuat memiliki persentase aset dengan nilai wajar level 3 yang lebih rendah. Artinya, *input* nilai wajar level 3 dapat diminimalkan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Buallay et al. (2017), menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu kombinasi dari kebijakan, undang-undang dan instruksi yang berpengaruh pada cara mengelola dan mengendalikan perusahaan. Tata kelola perusahaan dapat terlaksana dengan baik melalui dewan komisaris dan direksi yang menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, komite-komite yang lengkap dan melaksanakan tugasnya dengan baik, serta satuan kerja lainnya yang melaksanakan fungsi pengendalian internal bank (Putra & Fidiana, 2017).

Tidak hanya itu, pada faktanya implementasi nilai wajar di negara berkembang mengalami cukup banyak tantangan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Xiao et al. (2017) mengenai faktor yang menjadi tantangan dalam implementasi nilai wajar di negara berkembang yaitu China. Penelitian tersebut dilakukan kepada *Chief Financial Officer* (CFO), auditor, dan analis keuangan. Penelitian tersebut menemukan beberapa tantangan, yang utama adalah kesulitan dalam memperoleh informasi nilai wajar (Xiao et al., 2017). Sulitnya memperoleh informasi nilai wajar

terjadi karena pasar kurang berkembang dan tidak aktif untuk aset dan kewajiban tertentu (Xiao et al., 2017). Kesulitan tersebut khususnya berlaku bagi nilai wajar level 2 dan 3 karena tidak terdapat di pasar aktif.

Kesulitan tersebut juga terjadi di Indonesia. Muklis (2016), berpendapat bahwa pasar modal di Indonesia masih mengalami sejumlah tantangan diantaranya yaitu terbatasnya produk investasi pasar modal dan jumlah investor domestik yang masih sedikit. Linawati (2016), juga menjelaskan bahwa bursa saham di Indonesia memiliki likuiditas yang rendah karena terdapat cukup banyak saham tidur atau saham yang tidak aktif. Pasar modal di Indonesia masih mengalami beberapa persoalan, salah satunya adalah ketersediaan produk yang sangat terbatas di pasar modal karena kurangnya jumlah dan keberagaman produk (Merdeka, 2020). Keberagaman produk pasar modal Indonesia masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara lain (Market Bisnis, 2020).

Penjelasan di atas dibuktikan oleh data transaksi saham di Indonesia yang berbeda cukup jauh dengan Hongkong yang termasuk sebagai negara maju. Pada tanggal 15 Juni 2021, Bursa Efek Indonesia mencatatkan transaksi saham sebanyak 18.194.000.000 lembar sedangkan pada tanggal yang sama Bursa Efek Hong Kong (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) melaporkan adanya transaksi sebanyak 261.555.408.371 lembar saham. Perbedaan yang cukup jauh ini menggambarkan bahwa pasar modal di Indonesia masih kurang likuid apabila dibandingkan dengan negara maju.

Bukti lain dari pasar modal di Indonesia yang kurang likuid adalah beberapa perusahaan yang mengukur nilai wajar aset keuangannya pada level 2 dan 3

dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa *quoted price* untuk aset dan liabilitas di pasar aktif masih sangat terbatas. Apabila *quoted price* untuk aset dan liabilitas tertentu tidak tersedia di pasar aktif, maka perusahaan harus menggunakan level 2 dan 3 untuk mengukur nilai wajar aset dan liabilitasnya. Nilai wajar level 2 merupakan *input* yang masih dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung, salah satu caranya yaitu melalui nilai wajar aset atau liabilitas serupa yang terdapat di pasar aktif (PSAK 68, 2013). Sehingga nilai wajar level 2 masih memiliki keandalan yang cukup baik. Namun, berbeda dengan nilai wajar level 3 dimana *input* aset dan liabilitas sama sekali tidak dapat diobservasi sehingga pengukurannya menggunakan asumsi manajer dan menggunakan informasi-informasi seperti data milik entitas (PSAK 68, 2013).

Kondisi tersebut memberikan celah bagi manajer untuk melakukan kecurangan, dimana hal tersebut dapat menjadi indikator subyektifitas. Oleh sebab itu, implementasi nilai wajar level 3 di Indonesia perlu lebih diperhatikan karena dapat menjadi peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik yang menguntungkan perusahaan.. Contoh aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar level 3 menurut laporan keuangan BNII tahun 2015 adalah investasi keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang, penyertaan saham, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali-bersih, kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, piutang pembiayaan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai implementasi nilai wajar pada seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti akan meneliti data perusahaan tahun 2015-2019 dari 44 perbankan yang terdaftar di BEI. Peneliti termotivasi untuk menggunakan bank sebagai sampel karena bank merupakan sektor utama yang mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan negara (Zhang et al., 2019). Selain itu, neraca perbankan sebagian besar terdiri dari instrumen keuangan dimana implementasi nilai wajar memberi dampak yang cukup signifikan dan relevan dalam penyajian laporan keuangan (Mauro et al., 2017). Perbankan merupakan sampel yang tepat untuk mengeksplorasi implementasi akuntansi nilai wajar karena bank memiliki sejumlah instrumen keuangan yang mengacu pada standar nilai wajar dalam pelaporannya (Beatty & Liao, 2014).

Pelaporan nilai wajar sangat penting bagi perbankan karena membantu meningkatkan kepercayaan, akuntabilitas, transparansi, dan komitmen terhadap pasar keuangan dan masyarakat (Zhang et al., 2019). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Xiao et al. (2017) juga mengungkapkan pentingnya pelaporan nilai wajar yaitu untuk membantu meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan internal dan akurasi perkiraan pendapatan.

Peneliti menggunakan *Return on Equity* (ROE) untuk mengukur kinerja perusahaan. Peneliti memilih ROE sebagai proksi atas kinerja perusahaan karena ROE merupakan ukuran utama kinerja dalam industri perbankan, yang digunakan untuk mengalokasikan modal di dalam dan lintas divisi (Moussu & Petit-Romec, 2014). Chong et al. (2012), menyatakan bahwa bank-bank yang

memiliki kinerja buruk seperti laba yang rendah, provisi kerugian pinjaman yang tinggi, dan arus kas yang buruk memiliki persentase lebih tinggi pada aset level 3. Kemudian Zhang et al. (2019), berpendapat bahwa pengukuran nilai wajar level 3 digunakan untuk menyamakan kinerja perusahaan yang buruk. Bank dengan kinerja yang buruk lebih cenderung menggunakan keleluasaan yang tersedia dalam mengukur nilai wajar aset level 3 untuk melakukan perilaku oportunistik (Yao et al., 2016). Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa terdapat perilaku oportunistik dalam pengukuran nilai wajar level 3 yang digunakan untuk menyamakan kinerja perusahaan yang buruk.

Pendapat tersebut didukung oleh penjelasan Wang & Zhang (2017) bahwa terdapat peningkatan *agency conflict* yang didorong oleh pengukuran nilai wajar yang kurang dapat diandalkan (nilai wajar level 3) karena adanya perilaku oportunistik manajer dan kesalahan estimasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan banyak menggunakan pengukuran nilai wajar level 3 maka artinya kinerja perusahaan sedang mengalami penurunan yang kemudian disamakan melalui nilai wajar level 3. Dimana penurunan kinerja perusahaan dalam penelitian ini digambarkan melalui nilai ROE yang rendah.

Pada penelitian sebelumnya oleh Zhang et al. (2019) tata kelola diukur menggunakan *score* yang sudah ada, namun pada penelitian ini peneliti akan mengukur tata kelola dengan melakukan perhitungan berdasarkan variabel yang ditentukan peneliti yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. Mekanisme tata

kelola perusahaan berperan untuk mengurangi praktik perilaku oportunistik manajer yang pada penelitian ini perilaku oportunistik manajer dapat terjadi melalui *input* nilai wajar level 3.

Kepemilikan manajerial adalah salah satu mekanisme tata kelola perusahaan dimana manajer juga berperan sebagai pemegang saham perusahaan (Aprianingsih & Yushita, 2016). Kepemilikan manajerial akan membuat manajemen lebih waspada serta menyelaraskan kepentingan mereka dengan para pemegang saham lainnya sekaligus memantau dan mengarahkan manajemen, hal ini akan berdampak besar dalam menghalangi perilaku oportunistik manajer (Mwapula, 2016), (Sianturi et al., 2017), dan (Agustiany, 2020). Oleh sebab itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan kepemilikan manajerial sebagai salah satu proksi untuk mengukur tata kelola perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah besaran persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi baik di dalam maupun di luar negeri (Giovani, 2019). Herdjiono & Sari (2017), berpendapat bahwa kepemilikan institusional menyebabkan adanya peningkatan pengawasan oleh investor institusi yang dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer. Oleh sebab itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan kepemilikan institusional sebagai salah satu proksi untuk mengukur variabel tata kelola perusahaan.

Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak diperbolehkan memiliki keterkaitan apapun dengan pengelolaan perusahaan (Rimardhani et al., 2016). Aprianingsih & Yushita (2016), berpendapat bahwa dewan komisaris independen dapat melaksanakan pengawasan serta memberikan masukan

kepada direksi dengan lebih objektif.. Independensi dewan komisaris merupakan kunci dalam memastikan bahwa manajer tidak melakukan perilaku oportunistik (Mwapula, 2016). Oleh sebab itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan independensi dewan komisaris sebagai salah satu proksi untuk mengukur tata kelola perusahaan.

Terdapat berbagai macam mekanisme pengawasan dan tata kelola yang efektif oleh komite audit, diantaranya adalah jumlah rapat komite audit, jumlah atau proporsi komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi, serta jumlah atau proporsi komite audit independen (Pamudji & Trihartati, 2012). Karakteristik yang paling sering dibahas sebagai syarat pengawasan komite audit yang efektif adalah independensi (Lawrence et al., 2000). Oleh sebab itu, ukuran komite audit pada penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan jumlah komite audit independen dengan total komite audit yang dimiliki perusahaan.

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian mengenai topik ini masih terbatas dilakukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan karakteristik yang berbeda dengan negara maju lain dimana implementasi nilai wajar ini mengalami banyak kendala dan tantangan. Oleh sebab itu, topik ini penting untuk diteliti karena implementasi nilai wajar di Indonesia masih mengalami banyak tantangan serta pengungkapan informasi nilai wajar dapat memberikan manfaat penting bagi pengguna laporan keuangan maupun bagi perusahaan. Peneliti menemukan beberapa penelitian serupa yang dilakukan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Trianto (2019) menguji apakah informasi dari hierarki nilai wajar merupakan nilai yang relevan dan apakah nilai wajar aset level 1 dan 2 lebih relevan dibandingkan nilai wajar aset level 3. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa informasi nilai wajar aset level 1, 2, dan 3 merupakan nilai yang relevan serta bahwa relevansi terendah ada pada nilai wajar aset level 3. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Palasari (2018) yang meneliti apakah penerapan akuntansi nilai wajar berpengaruh terhadap indikasi manipulasi laporan keuangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa akuntansi nilai wajar level 2 dan 3 berpengaruh positif terhadap indikasi manipulasi laporan keuangan, artinya semakin tinggi aset dengan nilai wajar level 2 dan 3 maka semakin tinggi pula indikasi manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian di Indonesia berfokus pada pengaruh nilai wajar pada indikasi manipulasi laporan keuangan serta relevansi nilai dari nilai wajar. Peneliti melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda, yaitu menguji mengenai pengaruh nilai tata kelola pada nilai wajar dan pengaruh nilai wajar pada kinerja perusahaan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Zhang et al. (2019). Penelitian Zhang et al. (2019) dilakukan di United States dengan kondisi pasar yang berbeda dengan Indonesia, sehingga diharapkan akan memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan indikator tata kelola dengan cara *self assessment* dan dibagi dalam 4 jenis mekanisme tata kelola. Penelitian Zhang et al. (2019) menggunakan skor tata kelola perusahaan yang telah disediakan

oleh pihak ketiga seperti *Corporate Governance Perception Index*. Pengukuran tata kelola perusahaan dengan *self assessment* akan dapat menghasilkan data yang lebih spesifik untuk masing-masing mekanisme tata kelola di tiap perusahaan dan tidak berdasarkan nilai yang diukur secara global. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Tata Kelola terhadap Pengukuran Nilai Wajar Aset Keuangan dan Nilai Wajar Aset Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *input* nilai wajar level 3?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *input* nilai wajar level 3?
3. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap *input* nilai wajar level 3?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *input* nilai wajar level 3?
5. Apakah *input* nilai wajar level 3 berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk meneliti apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *input* nilai wajar level 3.
2. Untuk meneliti apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *input* nilai wajar level 3.
3. Untuk meneliti apakah independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap *input* nilai wajar level
4. Untuk meneliti apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *input* nilai wajar level 3.
5. Untuk meneliti apakah *input* nilai wajar level 3 berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan.

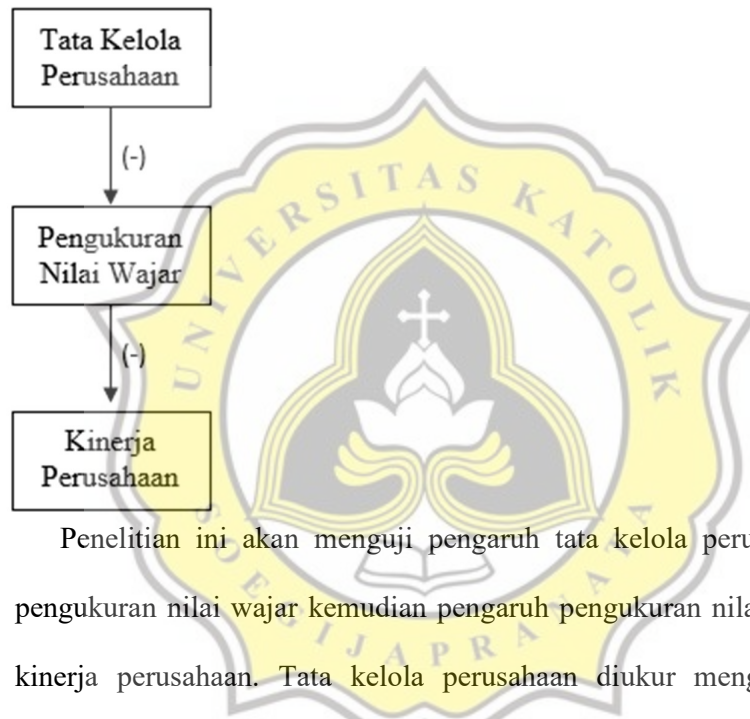
1.3.2 Manfaat penelitian

1. Penelitian ini diharap dapat memberi informasi atau teori mengenai pengaruh antara tata kelola perusahaan, pengukuran nilai wajar, dan kinerja perusahaan.
2. Peneliti berharap supaya penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis.
3. Penelitian ini diharap dapat memerikan kontribusi di bidang akademik khususnya yang berkaitan dengan nilai wajar.
4. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk mengangkat topik ini mengingat penelitian sejenis masih sangat terbatas di Indonesia.

5. Penelitian ini diharap dapat memberi informasi baru bagi investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya dalam menilai kinerja perusahaan.

1.4 Kerangka Pikir

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian



Penelitian ini akan menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengukuran nilai wajar kemudian pengaruh pengukuran nilai wajar terhadap kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan diukur menggunakan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit yang independen. Pengukuran nilai wajar diukur menggunakan proksi *input* nilai wajar level 3. Kemudian, kinerja perusahaan akan diukur menggunakan proksi *Return on Equity* (ROE). Hubungan variabel pada penelitian ini diasumsikan sama dengan penelitian terdahulu yaitu tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris

independen, dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *input* nilai wajar level 3 kemudian *input* nilai wajar level 3 berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROE.

